

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), hlm.1.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 80.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), hlm.123.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1,
- Arie S Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 164.
- Boedi Harsono (Selanjutnya disebut Boedi Harsono I), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 81-82.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta,1989, hlm 97.
- Ida Nurlida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.74.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asaz*, Yogyakarta : Liberty, 1981, Hal. 7.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, Cet.4
- Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2010), hlm.203.
- Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yudistira, Yogyakarta, 2012, hal. 51.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet.4,
- R.Roestandi Adiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, N.V.Masa Baru, Bandung,1962, hlm.53.

- Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. V, Ghalia Indonesia, jakarta, 1995
- Rusmandi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 2007,
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 316
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,
- Sudikno Mertokusumo I, *Menganai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.9.6.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Jakarta, Alfabeta, 2008

B. Sumber Lain

- 1) Peraturan Perundang-Undangan
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Pasal 1 butir 1 Permeneq Agraria /Kepala BPN No. 5/1999.
 - Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - Penjelasan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - Penjelasan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (1).
 - Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 43 ayat 1
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 16
- 2) Karya Tulis

Dian Komala Nofitri, "*Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah, Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97- 98/Pdt/2009/PN-PBR,*" (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2011), hlm. 32.

Helena, Eksistensi dan Kekuatan Alat Bukti Atas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang Dibuat Dihadapan Notaris atau Camat Studi di Kabupaten Deli Serdang (Tesis Universitas Sumatera Utara 2007).

Hendra Dwi Putra, "*Kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Bukti Perolehan Hak atas Tanah di Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau,*" (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2016), hlm. 68.

3) Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3014K/PDT/2009

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara 75/Pdt/G/2007/PN.PBR

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 32/Pdt/2009/PTR

4) Wawancara

Wawancara penulis dengan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi

Wawancara penulis dengan Tokoh Masyarakat, Ilyas Jacob